



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

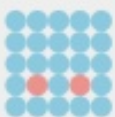
Krisis ekonomi sejak Juni 1997 sangat besar dampaknya terhadap ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Krisis tersebut menyebabkan krisis multidimensi, baik krisis di bidang politik, ekonomi dan krisis-krisis lainnya yang sampai saat ini masih dirasakan. Krisis multidimensi ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat secara signifikan, yang diawali dengan terdepresiasinya rupiah secara tajam, sektor riil mengalami kemunduran bahkan kemacetan dalam jumlah besar sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin secara drastis.

Sektor perbankan merupakan sektor yang paling pertama terkena dampak negatif krisis ekonomi, sehingga berkurangnya jumlah bank telah memberikan dampak negatif dalam perekonomian. Hal yang paling memprihatinkan adalah munculnya kredit bermasalah menjadi cukup besar karena banyak terjadi pelanggaran rambu-rambu perbankan, terutama tentang *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Legal Lending Limit, Likuiditas, Profitabilitas, Administrasi dan Manajemen. Akibat lebih serius yang dihadapi selain penyelesaian kredit bermasalah adalah munculnya banyak bank bermasalah.

Usaha pemerintah untuk mengatasi kemelut di dunia perbankan adalah dengan merestrukturisasi bank-bank bermasalah, dimana pada tanggal 1 Nopember 1997 pemerintah telah melikuidasi 16 buah bank dan

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perbankan Bogor  
**MB-IPB**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



membekukan operasi serta melakukan take over berturut-turut 10 buah dan 4 buah bank pada bulan April dan Agustus 1998. Terakhir pada tanggal 13 Maret 1999 pemerintah kembali melikuidasi 38 buah bank, melakukan take over atas 7 bank serta merekapitalisasi 9 buah bank.

Krisis yang melanda Indonesia tidak hanya menimpa perusahaan besar dengan hutang yang besar, tetapi juga menimpa perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dilihat dari statistik BPPN terlihat bahwa dari sekitar 110.000 debitur yang persoalan kreditnya sudah masuk dalam kredit macet *collectibility* (golongan) 5, hanya 2 persen yang merupakan debitur besar selebihnya 98 persen adalah perusahaan kecil/menengah dan ritel. Tetapi dari segi jumlah kreditnya perusahaan kecil/menengah dan ritel hanya merupakan 28 persen dari seluruh kredit macet kolektibilitas 5.

Oleh karena itu, kegiatan menyalurkan kredit ke masyarakat tetap memegang peranan penting bagi kehidupan bank umum di negara maupun di dunia ini. Kegiatan menyalurkan kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank umum. Likuiditas keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank umum sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit yang disalurkan.

Upaya untuk mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi di bidang ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai karena penyelenggaraan negara di bidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang





terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif dan kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar pulau, antar golongan pendapatan, telah meluas keseluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak kuat yang ditandai dengan berkembangnya monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu. Oleh karena itu, misi yang diamanatkan oleh rakyat dalam GBHN 1999-2004 yang menyangkut sistem ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut : pembudayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Pada umumnya, industri kecil membuat berbagai macam produk yang dapat digolongkan ke dalam dua kategori : barang-barang untuk keperluan konsumsi (*final demand*) dan barang-barang industri seperti barang modal dan penolong (*intermediate demand*), (Tambunan, 1999). Di banyak, negara termasuk Indonesia, jenis-jenis barang konsumsi tertentu seperti makanan dan minuman, pakaian jadi, tekstil, alas kaki dan alat-alat rumah tangga, industri kecil masih dapat bertahan di pasaran dan bahkan menikmati pertumbuhan volume produksi yang lumayan besar setiap tahunnya, walaupun menghadapi persaingan yang ketat dari

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



MB-IPB

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perikanan Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



industri menengah dan besar. Hal ini terutama disebabkan karena industri kecil walaupun memproduksi barang yang sama seperti diproduksi oleh industri besar dan menengah, tetapi ada perbedaan secara alamiah atau rekayasa seperti : dalam hal warna, bentuk, rasa, kemasan, harga, atau pelayanan. Dengan kata lain, walaupun jenis barangnya sama tetapi industri kecil mempunyai segmen pasar tersendiri yang melayani kelompok pembeli (konsumen) tertentu. Di samping itu perbedaan selera atau pola konsumsi di dalam masyarakat untuk barang yang sama juga sangat menentukan besar kecilnya pasar industri kecil.

Hal tersebut diatas merupakan penyebab mengapa sampai sekarang jumlah usaha industri kecil cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula penyerapan jumlah tenaga kerjanya apabila dibandingkan dengan industri menengah dan besar, seperti terlihat didalam Tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 1. Banyaknya Usaha dan Pekerja di Sektor Industri Menurut Golongan Industri Tahun 1994 - 1998 (dalam ribuan)**

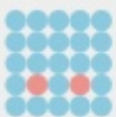
Golongan Industri	1994		1995		1996		1997	
	Usaha	Pekerja	Usaha	Pekerja	Usaha	Pekerja	Usaha	Pekerja
1. Industri Besar & Sedang	19	3,814	22	4,174	23	4,215	20	3,536
2. Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	2,540	5,355	2,604	5,567	2,867	6,614	2,197	5,302
<b>Jumlah</b>	<b>2,559</b>	<b>9,169</b>	<b>2,626</b>	<b>9,741</b>	<b>2,890</b>	<b>10,829</b>	<b>2,217</b>	<b>8,838</b>

Sumber : Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan, Thoha, 2002

Tabel diatas memperlihatkan bahwa 99 persen industri yang ada di Indonesia adalah merupakan industri kecil dan rumah tangga. Sebenarnya

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPR



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perencanaan Bogor  
**MB-IPB**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





potensi industri kecil dan rumah tangga sangat besar untuk menopang perekonomian Indonesia apabila dikembangkan dengan baik dan benar. Setidaknya industri kecil dan rumah tangga dapat membantu penyerapan ledakan tenaga kerja.

Apabila kita lihat dari penyebaran lokasi usaha dan besarnya tenaga kerja yang diserap, tampak bahwa lokasi industri kecil dan rumah tangga hampir 80 persen adalah berada di wilayah kawasan barat Indonesia (Sumatera, Jawa dan Bali), seperti terlihat pada Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Banyaknya Usaha dan Pekerja Industri Kecil dan Rumah Tangga Menurut Wilayah Tahun 1998 (dalam ribuan)

Wilayah	persen Luas	Usaha ( 000 unit )		Pekerja ( 000 unit )	
	Wilayah	Banyaknya	( persen)	Banyaknya	( persen)
<b>Kawasan Barat</b>	<b>31.77</b>	<b>1,754.90</b>	<b>79.88</b>	<b>4,346.20</b>	<b>81.97</b>
1. Sumatera	24.90	286.50	13.94	737.30	13.91
2. Jawa dan Bali	6.87	1,468.40	66.84	3,608.90	68.06
<b>Kawasan Timur</b>	<b>68.23</b>	<b>441.90</b>	<b>20.12</b>	<b>956.00</b>	<b>18.03</b>
1. Nusa Tenggara	4.24	152.30	6.93	318.30	6.00
2. Kalimantan	28.29	97.20	4.42	207.40	3.91
3. Sulawesi	9.90	172.90	7.88	382.80	7.22
4. Maluku dan Irian Jaya	25.80	19.50	0.89	47.50	0.90
<b>Indonesia</b>	<b>100.00</b>	<b>2,196.80</b>	<b>100.00</b>	<b>5,302.20</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan, Thoah, 2002

Profil usaha kecil di Indonesia dicirikan oleh beberapa kelemahan yaitu akses kepada sumber dana yang rendah, ketrampilan dan penguasaan teknologi yang rendah, status hukum sebagai lembaga informal, serta aspek pemasaran yang rendah.





Dalam perkembangannya, usaha kecil, menengah dan koperasi menghadapi permasalahan yang dapat dikategorikan ke dalam permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal terkait dengan sumber daya dan perputaran modal, organisasi dan manajemen, teknologi dan informasi serta pemasaran dan jaringan bisnis. Sedangkan, permasalahan eksternal yang dihadapi dalam bentuk perubahan iklim domestik adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas serta ketidaksamaan dalam pemahaman mengenai usaha kecil.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah, meluncurkan beberapa program dalam upaya pengentasan kemiskinan. Terdapat 17 skim kredit program yang didesain untuk memberikan peluang yang lebih terbuka kepada masyarakat kecil, sehingga diharapkan mulai dari pengusaha kecil dan masyarakat kecil lainnya, ekonomi dapat tumbuh dan berkembang.

Kredit program yang diluncurkan pemerintah, terdiri dari dua yaitu kredit program lama yang diteruskan dan kredit program baru. Kredit program lama yang diteruskan, meliputi KUT, KKPA, KKOP, KKPA-TR, KPRS/KPRSS, KKPA-TKI, KKPA PIR-Trans KTI, KKPA Pertanian. Sedangkan kredit program baru meliputi KMK-BPR/BPRS, KPKM/PPKM, KPTTG-Taskin, KMK-UKM, KPT-PUD, Taskin Koppas, KKPA-Unggas, KKPA-Nelayan dan KUA-UBP.

Sampai saat ini belum terdapat informasi secara menyeluruh terhadap hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kredit program ini, namun demikian yang banyak muncul dipermukaan adalah banyak terjadinya

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor  
MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



permasalahan dalam pengembalian KUT, terutama yang berkaitan dengan penyelewengan, penyalahgunaan dana oleh pengurus KUD, LSM, dan kegagalan panen. Sedangkan skim kredit lainnya tidak diperoleh informasi tentang keberhasilan atau kegagalannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) (2000), menyatakan bahwa hanya sebagian kecil industri kecil dan rumah tangga saja yang memanfaatkan bank untuk menutupi kekurangan modal. Persentasi banyaknya usaha industri kecil yang memanfaatkan pinjaman modal dari bank sebesar 37,4 persen yang ternyata jauh lebih besar bila dibandingkan dengan usaha industri rumah tangga yang hanya sekitar 8,6 persen. Sementara persentase banyaknya usaha industri rumah tangga yang meminjam modal ke koperasi sekitar 2,8 persen, tidak berbeda jauh dengan usaha industri kecil yang sebesar 3,6 persen. Disisi lain ternyata sebagian besar usaha industri rumah tangga dengan industri kecil yang sekitar 58 persen meminjam modal di luar bank, seperti terlihat dalam Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Persentase Banyaknya Industri Kecil dan Rumah Tangga yang Meminjam Modal berdasarkan Asal Pinjaman, Tahun 1998

Asal Pinjaman	Industri Rumah Tangga ( persen)	Industri Kecil ( persen)
1. Bank	8.6	37.4
2. Koperasi	2.8	3.5
3. Modal Ventura	0.3	1.0
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.6	1.5
5. Keluarga	17.7	15.8
6. Perorangan	39.0	25.0
7. Lainnya	29.9	15.8

Sumber : Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan, Thoha, 2002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB



Kredit mikro, yang lebih dikenal dengan Kupedes (Kredit Usaha Pedesaan) telah dikenal luas di masyarakat pedesaan dan pengusaha kecil perkotaan tetap setia mendampingi pengusaha, bahkan di saat-saat krisis. Dalam perkembangan sebelum dan sesudah krisis, usaha-usaha yang dibiayai dengan kredit mikro relatif tidak terpengaruh dan sebagai salah satu yang tahan dan tetap "survive" ketika krisis terjadi.

Gambaran kolektibilitas kredit mikro yang telah disalurkan lembaga perbankan menunjukkan jenis kredit tersebut cukup potensial. Hal tersebut dapat dilihat dari data posisi Desember 1999, yaitu ; BRI Unit Desa 97 persen - 98 persen, BPR 74 persen - 100 persen, dan Grameen Bank 99 persen (Tabel 4).

Tabel 4. Jumlah Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tahun 1999

Jenis LKM	Jumlah (x Rp.Juta)
BRI Unit Desa	4,714,570
Koperasi Simpan Pinjam	104,679
Unit Simpan Pinjam-Koperasi Unit Desa	94,243
Unit Simpan Pinjam-Koperasi Perkotaan	1,134,612
BPR	2,337,223

Sumber : Direktorat Pengawasan BPR, BI, 1999, diolah

Besarnya potensi dana Mikro Banking terlihat dari besarnya volume dana yang terhimpun oleh Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 1999 mencapai Rp.20,787 trilyun.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB





Tabel 5. Jumlah Simpanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tahun 1999

Jenis LKM	Jumlah (x Rp.Juta)
BRI Unit Desa	17,554,250
Koperasi Simpan Pinjam	169,970
Unit Simpan Pinjam-Koperasi Unit Desa	46,028
Unit Simpan Pinjam-Koperasi Perkotaan	1,102,449
BPR	1,913,915

Sumber : Direktorat Pengawasan BPR, BI, 1999, diolah

Dalam upaya memperluas segmen pasar dan dengan melihat potensi pasar, maka manajemen PT "Bank X" telah memutuskan untuk menggarap pasar bisnis *micro banking* melalui pembentukan tim proyek *micro banking* pada tanggal 15 Mei 2000 sebagai salah satu upaya memperkuat bisnis PT "Bank X".

Misi Tim Proyek Mikro Banking adalah mengelola program-program penelitian dan pengembangan (R & D) aktivitas bisnis dan proyek *micro banking* sebagai bagian dari "Beyond 2000 Programs" untuk menunjang Visi, Misi, sasaran-sasaran, daya saing dan keunggulan kompetitif jangka panjang PT "Bank X". Sedangkan visi bisnis mikro banking adalah penyediaan produk dan jasa-jasa bank yang *profitable* dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.

Mikro Banking merupakan peluang pengembangan bisnis bagi PT "Bank X" yang perlu digarap dan ditangani secara baik dan profesional didasarkan pada potensi non standar banking/*unbankable* yang cukup besar dan paling tahan selama krisis. Pengembangan bisnis *micro banking* membutuhkan paradigma baru yang berbeda dengan paradigma konvensional banking.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IPR



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
 Institut Perbankan Bogor  
 MB-IPB

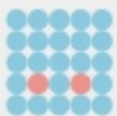


Produk dan jasa yang ditawarkan oleh Unit Bank Mikro harus mengikuti situasi dan kondisi masyarakat segmen mikro, yaitu ukuran serba kecil, fiturnya mudah dimengerti, prosesnya cepat dan pelayanannya serba informal. Upaya melayani masyarakat bawah (*Unbankable Market*) masih akan mengandalkan produk kredit, karena isu-isu pokok untuk membangun dan mengembangkan golongan masyarakat segmen mikro adalah kebutuhan dana bagi para pengrajin, industri rumah tangga, pedagang pasar, petani penggarap, dan lain-lain.

Salah satu tempat uji coba pengembangan Unit Layanan Mikro (ULM) adalah PT "Bank X" Kantor Cabang Tangerang. Kotamadya Tangerang mempunyai luas 183,78 km<sup>2</sup> dan Kabupaten Tangerang mempunyai luas 111,038 Ha<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 26 Kecamatan dan 111 Kelurahan. Jumlah penduduk yang berada di wilayah Tangerang sekitar 4.640.029 Jiwa. Evaluasi hasil pembangunan di bidang ekonomi dari data produk domestik regional bruto (PDRB) Kotamadya Tangerang menunjukkan perkembangan yang cukup meyakinkan dari Rp.14.973.425 Juta pada tahun 2001 meningkat sebesar 10,54 persen atau sebesar Rp.16.737.553 Juta pada tahun 2002. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa wilayah Tangerang memiliki potensi pasar yang besar untuk pengembangan *mikro banking*.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPP



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perbankan Bogor  
MB-IPPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPPB.



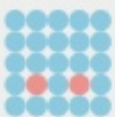
## B. Perumusan Masalah

Saat ini terdapat beberapa lembaga keuangan baik perbankan dan non bank yang menangani segmen mikro. Permasalahan utama terletak pada upaya mengatasi persaingan yang semakin tajam khususnya yang mengarah pada kredit berskala kecil dalam upaya untuk meningkatkan ekspansi kredit mikro agar target yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen PT "Bank X" dapat tercapai. Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang mendukung ekspansi kredit mikro khususnya di PT "Bank X" Cabang Tangerang, sebagai berikut ;

1. Bagaimana strategi bisnis kredit mikro yang tepat untuk meningkatkan ekspansi sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh PT "Bank X" Cabang Tangerang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan kredit mikro dalam upaya meningkatkan ekspansi kredit di PT "Bank X" Cabang Tangerang?
3. Apakah potensi daerah Tangerang memberikan peluang untuk meningkatkan ekspansi kredit di PT "Bank X" Cabang Tangerang?
4. Bagaimana meningkatkan daya saing PT "Bank X" Cabang Tangerang melalui strategi pemasaran yang efektif?

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perbankan Bogor  
**MB-IPB**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber ;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



### C. Tujuan Penulisan Tesis

Berdasarkan tinjauan latar belakang masalah dan perumusan masalahnya seperti di atas, maka tujuan geladikarya ini juga merupakan riset di bidang pemasaran kredit mikro yang bertujuan :

1. Mengkaji strategi pemasaran kredit mikro yang telah dilakukan oleh PT "Bank X" Cabang Tangerang.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kredit mikro dalam upaya meningkatkan daya saing.
3. Merumuskan strategi bisnis kredit mikro dalam rangka meningkatkan *outstanding* pinjaman di PT "Bank X" Cabang Tangerang.

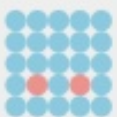
### D. Manfaat Penulisan Tesis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta bahan pertimbangan kepada pihak manajemen PT "Bank X" dalam menyusun strategi bisnis kredit mikro sehingga dapat meningkatkan ekspansi pinjaman sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh PT "Bank X" Cabang Tangerang.

Sedangkan bagi penulis sendiri, merupakan alat untuk belajar meningkatkan wawasan di bidang penelitian dan sebagai implementasi studi yang telah diberikan di MMA-IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perbankan Bogor  
MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





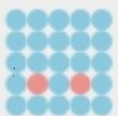
## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kredit mikro yang dilayani oleh PT "Bank X" Cabang Tangerang dengan mengambil sample dari pegawai dan nasabah PT "Bank X" yang ada di wilayah Tangerang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Unit Layanan Mikro (ULM) sebagai unit operasional *Micro Banking*. *Micro Banking* adalah merupakan salah satu *Business Unit* yang berada di dalam PT "Bank X". *Business Unit* (BU) merupakan unit organisasi yang berada di bawah *Strategic Business Unit* (SBU) yang memiliki karakteristik besar dan bisnis yang spesifik, memiliki kewenangan tersendiri dalam pengambilan keputusan bisnis dan kinerjanya diukur berdasarkan profitabilitas yang dicapai. *Business Unit* (BU) dibentuk dengan tujuan agar bisa melayani target pasar dan nasabahnya masing-masing dengan lebih fokus dan intensif. Struktur organisasi masing-masing ULM berada di bawah Kantor Cabang. Struktur organisasi ULM menganut organisasi fungsional. Dalam melaksanakan Geladikarya ini masalah yang dianalisa dibatasi pada kondisi internal perusahaan dan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kebijakan manajemen cabang, khususnya di bidang kredit mikro pada PT "Bank X" Cabang Tangerang. Kajian dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap memberikan alternatif strategi, sedangkan implementasinya diserahkan kepada PT "Bank X" Cabang Tangerang.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perbankan Bogor  
MB-IPB